

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Fenomena pergeseran media komunikasi kearah *IoT (Internet of Things)* sebagai salah satu model komunikasi saat ini harus disikapi positif oleh pemerintah daerah untuk bisa berinovasi untuk meningkatkan *performance organisation management and public service improvement*. Dimana dalam telaah ilmu komunikasi Mark Poster: 1990 menggambarkan dalam teori Media Baru yang disampaikannya bahwa media baru digambarkan sebagai (1) disentralisasi; (2) dua arah; (3) diluar kendali situasi; (4) demokratisasi; (5) mengangkat kesadaran individu; (6) orientasi individu (W. Littlejohn & A. Foss, Teori Komunikasi: Theori of Human Communication, 2009). *E-governmance* adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana definisi dari media menurut Marshall McLuhan dalam bukunya "*Understanding Media*", menyatakan bahwa media itu "*The Extension of Man*" (media itu perluasan manusia) (Marshall, 1964). Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu [<sup>1</sup>].

Era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan komputer tersebut, turut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah saat ini mulai memanfaatkan teknologi komputer sejalan dengan perkembangan jaman. Pemanfaatan teknologi komputer ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Penerapan tata pemerintahan yang baik, akan

berimplikasi pula terhadap pelayanan publik (*public service*) yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam penelitian Baharudin Noveriyanto [<sup>1</sup>] Implementasi *E-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkungan Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang juga merupakan landasan penting dalam pelaksanaan *E-government* di Indonesia

Kebijakan ini sekaligus mengharuskan instansi-instansi pemerintahan membangun dan menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan public. Mudjahidin [<sup>1</sup>] mengungkapkan Dengan tujuan kemudahan dalam melakukan komunikasi Konsep *E-government* merupakan salah satu contoh implementasi praktek *e-business* dalam bidang pemerintahan, sehingga penerapan *E-government* dilingkungan Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat (G2C), kepada pelaku bisnis (G2B), dan tentunya dengan pihak pemerintah sendiri (G2G). Dalam hal ini, konsep transformasi adalah hal utama yang harus diterapkan, bukan sekedar pemakaian teknologinya saja, melainkan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung dalam sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik [<sup>1</sup>].

Kota Pagaralam merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan *Electronic government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya dimana hasil dari penerapan teknologi *Electronic government* dapat membantu meningkatkan performa kinerja pemerintah kota dalam hubungan komunikasi internal maupun hubungan komunikasi eksternal. Beberapa layanan teknologi komunikasi dilayankan kepada masyarakat untuk memudahkan melakukan komunikasi baik komunikasi struktural internal, komunikasi antar instansi (G2G), komunikasi kepada masyarakat (G2C), dan komunikasi kepada pelaku bisnis (G2B). Namun seberapa jauh penggunaan teknologi informasi di dunia pemerintahan Indonesia berdampak pada kemudahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akanteta pi pemerintah kota pagaralam harus mengetahui tantangan dan peluang dari implementasi *Shared E-government Infrastructure* yang jelas guna untuk mengetahui skala prioritas pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Dalam perkembangan implementasi *E-government* dikalangan pemerintahan menjadi sebuah trend diseluruh penyelenggaraan pemerintahan, hampir keseluruhan jenis aplikasi yang dipergunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah maupun stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Pagaralam telah membuat dan mengembangkan *website* [www.PagaralamKota.go.id](http://www.PagaralamKota.go.id) sebagai wujud dari kebijakan penerapan *E-government*.

Permasalahan yang paling signifikan dalam penerapan kebijakan *Shared E-government* adalah kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang terkadang masih belum mampu menangani masalah sederhana seperti gangguan

pada sistem atau jaringan serta jumlah SDM yang belum memenuhi kebutuhan, dan untuk penyediaan infrastruktur juga masih belum maksimal. Sehingga beberapa aplikasi-aplikasi yang ada tidak berfungsi dengan baik karena kondisi jaringan yang lelet serta pemanfaatan media internet atau jaringan di lingkungan pemerintah Kota Pagaram sering kali bermasalah disebabkan gangguan jaringan. Akan tetapi pemerintah mencoba untuk memanfaatkan TIK untuk memodernisasi fungsi mereka dan untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Beberapa penelitian tentang e-government telah banyak diterapkan di mana lebih menekankan pada pengembangan pemerintah-ke-pemerintah, pemerintah-ke-warga, pemerintah-ke-bisnis, pemerintah-ke-masyarakat sipil dan warga negara-untuk-warga sebagai media komunikasi, koordinasi, dan peningkatan standarisasi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi di masyarakat, penelitian ini ingin mengidentifikasi peran Pemerintah Kota di kota pagaram untuk mengembangkan *e-government* yang berjudul” ***Developing Concept Shared E-Government Capability Studi Kasus di Kota Pagaram***”.

## **1.2 Identifikasi masalah penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pagaram belum sepenuhnya menggunakan *E-government*
2. Belum mempunyai suatu konsep untuk implementasi *shared E-goverment* di kota pagaram.

3. Belum diketahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal dalam implementasi *shared E-government infrastructure* untuk dapat membuat strategi yang baik untuk mendukung proses *E-government*.

### **1.3 Batasan masalah penelitian**

Batasan dari penelitian ini adalah :

1. Pembahasan lebih difokuskan pengembangan kemampuan pemerintah kota dalam hal *shared E-government* di kota Pagar Alam.
2. Hasil akhir dari penelitian ini berupa *Developing Concept Shared E-government Capability*.
3. Pengembangan konsep *Shared E-government Capability* dibuat dan dikembangkan dari Teknologi Infomasi yang ada pada saat penelitian dilakukan agar sesuai dengan arah perkembangan organisasi.

### **1.4 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi bahan untuk mengembangkan Konsep *Shared E-government Capability* di kota pagaralam.
2. Pada kelompok masalah Aplikasi Teknologi & Sistem Infomasi di pemerintah kota Pagar Alam ditemui aplikasi yang ada belum terintegrasi karena belum kuatnya infrastruktur yang ada untuk *Shared E-government*, sehingga dalam bidang aplikasi TI/SI ini seolah terdapat bagian terpisah-pisah.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pada tesis ini, maka tujuan dari penelitian melalui analisis yang telah dilakukan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mampu menemukan faktor-faktor yang menjadi bahan untuk mengembangkan *Concept Shared E-government Capability*.
2. Menghasilkan suatu bentuk *Concept Shared E-government Capability* yang selaras dengan Pemerintah Kota Pagar Alam sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan Teknologi Informasi pada Kota Pagar Alam.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *Concept Shared E-government Capability* pada kota pagaralam yang dapat membantu pemerintah Kota Pagar Alam agar dapat meningkatkan layanan pada bidang IT, serta dapat mendukung terwujudnya visi dan misi dari Pemerintah Kota Pagar Alam.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dari penulisan penelitian ini dengan melihat hal-hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Pagar Alam yang belum memiliki sebuah *Concept shared E-government Capability*.
2. Penelitian ini akan mengindikasi keselarasan/keserasian *Concept Shared E-government Capability* di Kota Pagar Alam.

### **1.8 Susunan dan Struktur Tesis**

Bagian ini merupakan Bab terakhir ada pun struktur atau sistematika penulisan dari penelitian adalah sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan adalah Bab I (pertama) tesis. Bab ini terdiri dari: (a) Latar belakang masalah yang akan diteliti; (b) Rumusan permasalahan; (c) Tujuan penelitian yang memuat tujuan umum dan tujuan khusus yang bersifat dapat diukur; (d) Harapan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh setelah penelitian/analisis dilakukan, (e) Ruang lingkup bahasan yang meliputi area, substansi, wilayah *geografis/ topografi/ administrasi*, pendekatan penelitian, subjek dan level pembahasan (makro atau mikro), dan (f) Susunan atau struktur tesis. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan relevansi atau kerangka hubungan antara topik yang dibahas dalam penelitian sesuai dengan konsentrasi yang dipilih.

## **Bab II Kajian Pustaka atau *Literature Review***

Bab Kajian Pustaka adalah Bab 2 (kedua) tesis. Bab Kajian Pustaka pada prinsipnya berupa kumpulan pustaka, kajian pustaka dan/atau *literatur review*. Dalam bab ini diulas berbagai publikasi resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau direncanakan modelnya, mencakup antara lain: aspek masalah yang diteliti, pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dan/atau model kerangka konsep yang dipakai, metode penelitian termasuk lokasi penelitian dilakukan, kondisi-kondisi penelitian dan hasil yang diperoleh sebagaimana dipaparkan dalam sumber bersangkutan.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan metodologi, dan metode penelitian yang dilakukan, serta berisi tentang penjelasan dari teori analisis pendukung penelitian yang akan dilakukan.

#### **Bab IV Gambaran Umum Objek & Hasil Penelitian**

Bagian Isi Tesis merupakan inti dari tesis yang terdiri dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian, untuk menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Bagian ini dapat disusun dengan beberapa alternatif pilihan bentuk isi yang disesuaikan dengan aspek dan ruang lingkup masalah penelitian.

#### **Bab V Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tesis.

#### **Bab VI Penutup**

Tesis, yang memuat kesimpulan hasil penelitian secara sistematis yang berkaitan dengan upaya menjawab hipotesa dan/atau tujuan penelitian. Pada akhir bab ini dikemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan maupun model/*prototipye* yang dihasilkan. Saran-saran tersebut dapat berupa bentuk kebijakan dan upaya praktis pemecahan masalah yang dihadapi dan bahan atau aspek yang dapat diteliti lebih lanjut. Saran harus dibuat se-operasional mungkin sehingga bermanfaat bagi mereka yang menerima saran tersebut. Isi bab ini adalah kesimpulan dan saran.



- 
- [i] Noveriyanto, Baharudin. 2018. E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Profetik Jurnal Komunikasi, hlm. 37-53 ISSN: 1979-2522 , ISSN:2549-0168.